

Penerima Bantuan Dana PNPM Mengadu ke Akademisi Unsoed

BANYUMAS (KR) - Merasa usahanya terancam bangkrut, lantaran program simpan pinjam bergulir dari Program Penerimaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM Mandiri Perdesaan terhenti.

Sebanyak 180 kelompok dengan jumlah anggota 1.326 orang pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Senin (3/4) sore mengadu ke akademisi Fisip Unsoed Purwokerto, untuk mencari solusi.

Simpan pinjam Program DBM eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng, terhenti setelah adanya dugaan korupsi yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto.

Sebelumnya mereka sangat terbantu dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bergulir sejak tahun 2014. Program Penggulangan dana eks PNPM sempat dikelola oleh PT LKM Kedungmas setelah Program PNPM Mandiri Perdesaan dihentikan kegiatannya pada tahun 2014 silam, kini telah berhenti.

Mereka mengaku sangat dirugikan, sedih dan terpukul karena unit usaha yang mereka rintis dengan bantuan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM Mandiri Perdesaan kini sudah tidak ada lagi. "Usaha kelompok kami sangat tergantung dengan adanya bantuan dari dana eks PNPM Mandiri di Kecamatan Kedungbanteng. Bahkan bersama 30 orang anggota, bisa mendapatkan bantuan hingga mencapai Rp. 500.000.000," kata Umi Atikoh, anggota Kelompok Kenanga dari Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas.

Menurutnya sejak dihentikannya program bantuan ini, banyak anggotanya yang kini terpaksa menghentikan usahanya, karena kekurangan modal. Mereka tersebar dalam aneka usaha seperti sembako, makanan, peternakan kambing, ikan, ayam, penjual rujak dan usaha lainnya. Pengakuan senada juga diungkapkan Tri Atminingsih, dari Desa Baseh, Kedungbanteng.

"Meski kini kelompoknya masih harus mengangsur, namun kelompoknya tidak bisa lagi menambah modal untuk usaha. Hal ini sangat merugikan, terutama bagi anggota yang menjalankan usaha dari sektor peternakan yang memang membutuhkan perguliran dana dengan cepat," ungkapnya. Berkaitan dengan adanya pengaduan keluhan dari masyarakat yang sangat terdampak dengan dihentikannya program simpanan bergulir akademisi dari Fisip Unsoed kini memang sedang fokus dalam penelitian dana eks PNPM.

Dr Alizar Isna SSos MSI menyampaikan program eks PNPM semestinya harus tetap berlanjut sebagai instrumen membantu masyarakat miskin mengatasi kemiskinannya. Ketika ada komunitas yang mampu mempertahankan program tersebut, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan apresiasi.

Menurutnya dari sisi kebijakan publik, pada hakekatnya program tersebut diharapkan tetap memiliki keberlanjutan dalam pelaksanaannya, terlebih program tersebut menggunakan sumber daya kebijakan. (Dri)-f

Perusahaan Akui Tak Sanggup Bayar Gaji Plus THR

KARANGANYAR (KR) - Modus perusahaan merumahkan hingga mengemplang hak karyawan jelang Lebaran terbongkar. Pihak perusahaan mengakui sedang terpuruk sehingga tak mampu membayar kewajibannya. Satu diantaranya PT Delta Merlin Dunia Textile 1 (DMDT 1). Bertujuan mengurangi beban keuangannya, perusahaan ini mengurangi sampai 40 persen aktivitas rutin. Imbasnya, shift kerja dipangkas dan karyawan dirumahkan. Selain itu, 50 persen lebih mesin produksi diistirahatkan.

"Berat sekali menghadapi situasi. Kita bikin kain, tapi impor ilegal kain mengalir deras. Harga lebih murah dengan kualitas jempolan. Pemerintah dimana perannya? Tak lama lagi pabrik-pabrik gulung tikar. Apalagi

perang Rusia-Ukraina juga berimbas bagi ekonomi negara ini," kata HRD PT DMDT 1, Suparno usai menghadiri audiensi bersama DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Karanganyar, Dinas Tenaga Kerja dan pimpinan DPRD, Selasa (4/4).

Ia berdalih tak memecat pegawai. Mereka hanya dibayar saat masuk kerja saja, dimana jam kerja dikurangi. Dalam sepekan hanya masuk 2-3 hari. Faktanya, banyak yang memilih tidak mengikuti aturan baru itu alias berhenti. "Dalam mediasi, kami minta mereka masuk tapi dioglang. (mereka pilih) enggak mau. Haknya dia dong kalau keluar," katanya. Dia juga mengakui tak serta merta memutus hubungan kerja. Saat kondisi perusahaan membaik,

mereka akan dipanggil kerja lagi. "Kalau sampai memecat, nyari lagi juga susah. Kita mengistirahatkan saja," dalihnya.

Ketua DPD FKSPN Karanganyar, Hariyanto mengatakan PT DMDT 1 hanya cari pembenaran saja terkait kewajiban yang dikemplang. Menurutnya, karyawan sudah memberikan kontribusi ke perusahaan dalam waktu yang tidak singkat. Selama itu pula, perusahaan menikmati keuntungan.

"Masalah kerugian akibat impor ilegal, perang Rusia-Ukraina, itu bukan urusan pegawai. Kita hanya menuntut hak yang harus dibayar perusahaan," katanya. Dalam audiensi di hadapan wakil rakyat, sebanyak 92 karyawan tetap PT DMDT 1 mengadukan na-

sibnya. Mereka dipecah secara sepihak tanpa pesangon.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo berharap kedua belah pihak dapat menyepakati hak dan kewajibannya sebelum Lebaran.

"Ironis sekali pegawai dipecah jelang Lebaran. Monggo dirembuk bersama. Perusahaan jangan semena-mena, harus berkonsekuensi kalau memecat. Pegawai itu manusia juga," katanya. (Lim)-f



Audiensi HRD dan pegawai PT DMDT 1 di gedung DPRD. KR-Abdul Alim

KPU Sukoharjo Temukan Empat Catatan Penting

SUKOHARJO (KR) - Empat Catatan penting masalah pokok ditemukan selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Keempatnya yakni, peralihan status TNI/Polri, perceraian dan perkawinan, nomor induk kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berbeda dan data kematian karena tidak memiliki akta kematian.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Nuril Huda, Selasa (4/4) mengatakan, KPU Sukoharjo selama proses Coklit daftar pemilih pemilu 2024 selalu memberikan pendampingan kepada Pantarlih. Hal ini penting mengingat sejumlah masalah ditemukan di lapangan. Penanganan dilakukan dengan men-

dasarkan ketentuan berlaku sesuai aturan dalam KPU RI.

Catatan KPU Sukoharjo selama proses Coklit daftar pemilih pemilu 2024 oleh Pantarlih ditemukan empat pokok masalah. Masalah yang muncul tersebut sering ditemukan setiap kali proses Coklit saat menjelang pemilu berlangsung. "Masalah yang muncul itu klasik. Artinya selalu rutin ditemukan petugas saat Coklit daftar pemilih pemilu," ujarnya.

Nuril menjelaskan, catatan masalah pertama terkait peralihan status TNI/Polri. Sebab banyak ditemukan Pantarlih di lapangan saat Coklit menemukan cukup

banyak penduduk mengalami perubahan status TNI/Polri baik pensiun maupun baru masuk menjadi anggota. KPU Sukoharjo tidak punya kewenangan mencoret data peralihan status tersebut. Sebab KPU Sukoharjo selama ini mengacu pada Undang-Undang Kependudukan dimana status penduduk yang tercantum di KTP dan KK itulah yang dipakai.

KPU Sukoharjo meminta kepada instansi terkait seperti Kodim 0726 dan TNI lainnya untuk membantu terkait peralihan status kependudukan. Hal sama juga diminta kepada Polres Sukoharjo maupun instansi kepolisian lain seperti Polda Jawa Tengah maupun Mabes Polri. Sebab cukup banyak penduduk di Kabupaten Sukoharjo menjadi anggota Polri baik yang sudah pensiun maupun baru masuk.

Terkait peralihan status, KPU Sukoharjo meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo ikut aktif membantu dan bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri. Sebab Dispendukcapil Sukoharjo memiliki kewenangan pencetakan KTP dan KK terkait status kependudukan.

Temuan masalah kedua selama proses Coklit oleh Pantarlih yakni terkait status perceraian dan perkawinan. Sebab data ditemukan di lapangan sering mengalami perbedaan dimana ada penduduk yang masih dalam satu KK ternyata statusnya sudah bercerai. Selain itu ada juga temuan penduduk masih dalam proses perceraian. Petugas mengalami kesulitan saat akan mendata karena orangnya tidak ketemu. (Mam)-f

HUKUM

Nenek Bunuh Diri Terjun ke Sumur

BANTUL (KR) - Supardinah (65) warga Ngestiharjo Kasihan Bantul, Rabu (5/4) sekitar pukul 10.00, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, tenggelam di dalam sumur yang berkedalaman sekitar 8 meter. Diduga kematian korban karena sengaja bunuh diri.

Menurut Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jefri, kejadian berawal pukul 08.15, korban berusaha naik bibir sumur, Namun saat itu diketahui warga.

Tapi pukul 10.00 ada warga yang melihat korban sudah duduk di bibir sumur dan langsung terjun masuk kedalam sumur. Melihat kejadian tersebut warga kemudian menghubungi Ketua RT setempat dan Polsek terdekat, untuk melakukan evakuasi.

Korban dapat dievakuasi dari dalam sumur pada pukul 11.40, tetapi sudah meninggal dunia. Upaya evakuasi di-

lakukan petugas Damkar Kota Yogya Pos Kyai Mojo dan dari BPBD Kab. Bantul.

Sementara hasil pemeriksaan Inafis Polres Bantul serta dokter Puskesmas Kasihan 2, dr Ulfa, kondisi jenazah korban ditemukan memar pada bagian lengan atas kanan dan kiri dikarenakan bekas evakuasi.

Lebam pada punggung dan paha kiri dimungkinkan akibat benturan saat terjun ke sumur.

Atas kejadian tersebut pihak keluarga telah menerima kematian korban selanjutnya membuat Surat Pernyataan yang diwakili keponakan korban An.

Menurut tetangganya, korban sudah 3 kali berniat untuk bunuh diri karena ingin ikut suaminya yang sudah meninggal pada bulan Agustus 2022. Korban juga mempunyai riwayat penyakit jantung. (Jdm)-f

Pelaku Remas Paha Diringkus Polisi

PURWOREJO (KR) - Petugas Satuan Reskrim Polres Purworejo berhasil meringkus terduga pelaku remas paha yang viral di Kecamatan Kutoarjo. Pelaku berinisial MI (28), diamankan di rumahnya di wilayah Kecamatan Kutoarjo pada Selasa (4/4). Kasi Humas Polres Purworejo, AKP Yuli Monasoni SH, mengatakan penangkapan tersangka berawal dari viralnya perbuatan asusila yang dilakukan MI di media sosial. "Beredar video ketika tersangka beraksi, dan akhirnya ada korban yang melapor dan bisa ditindaklanjuti polisi," katanya kepada KR, Rabu (5/4).

Ada lima korban yang melapor ke Polsek Kutoarjo. Dalam salah satu laporannya, korbananya merupakan siswi salah satu SMP negeri di Kecamatan Kutoarjo. Korban dibonceng orangtuanya dengan sepeda motor. Kemudian dari arah belakang, pelaku mengendarai motor membuntuti dan memepet korban.

Pelaku meremas bagian paha korban, kemudian melarikan diri. "Pelaku diidentifikasi memiliki tubuh gemuk dengan mengendarai motor matik," ungkapnya. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, korban melaporkan pelecehan tersebut ke kepolisian.

"Kami menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan pelaku," ucapnya. Kani Reskrim Polsek Kutoarjo, Ipda Triono, menambahkan, tersangka beraksi lebih dari satu kali. "Terus kami dalam keterangan tersangka, tapi yang jelas sudah lima korban yang melapor ke polisi," katanya. (Jas)-f

PACARI WANTA BERSUAMI

Polisi Gadungan Edarkan Video Porno

WONOSARI (KR) - Seorang pria berinisial AP (27) warga Kapanewon Wonosari mengaku sebagai anggota Polri di Magelang Jawa Tengah, ditangkap petugas Polres Gunungkidul karena dilaporkan melakukan tindak pidana pornografi dengan menyebarkan video porno.

Kasi Humas Polres Gunungkidul, Iptu Suranto, menyatakan penangkapan tersangka AP berdasarkan laporan seorang wanita bersuami Ny AL (30) warga Kapanewon Rongkop. "Dari laporan korban, polisi langsung melakukan penangkapan terkait dengan pengakuan tersangka sebagai anggota Polri dan mengedarkan video porno," jelasnya, Rabu (5/4).

Dari informasi yang diperoleh, Ny AL mengaku berke-

nalalan dengan seorang pria yang mengaku berinisial AP, berprofesi sebagai anggota Polri dan bertugas di wilayah Magelang. Komunikasi antara keduanya berjalan intens hingga akhirnya terjalin hubungan asmara.

Komunikasi keduanya terus terjadi dan AP sering meminta Ny AL berpose telanjang saat melakukan videocall. Ternyata, saat melakukan videocall tiap adegan direkam tanpa sepengetahuan Ny AL. Pada bulan Fe-

bruari 2023 lalu, Ny AL berniat mengakhiri hubungan dengan AP. Namun saat itu AP menolak dan mengancam akan menyebarkan video telanjang korban.

Ancaman itu ternyata tidak sebatas ancaman lisan dan tertulis dalam pesan singkat melalui ponsel. Tapi pada pertengahan Maret lalu, suami Ny AL mendapat pesan melalui whatsapp dari nomor tak dikenal yang mengirimkan video Ny AL saat tanpa busana.

Merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya, Ny AL kemudian melapor ke Polres Gunungkidul. Usai mendapatkan laporan, Unit Pidsus Satreskrim Polres Gunungkidul melakukan penyelidikan berbekal dengan keterangan dari kor-

ban dan bukti-bukti yang ada.

"Tersangka akhirnya berhasil dibekuk di sebuah toko jejaring dan dari hasil pemeriksaan ternyata pria tersebut bukan sebagai anggota Polri, tapi pegawai swasta," imbuhnya.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan beberapa handphone yang diduga digunakan tersangka untuk mengedarkan video porno.

Atas perbuatannya, AP dijerat Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 45 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. (Bmp)-f

KASUS KORUPSI DANA OBJEK WISATA

Kades Berjo Divonis 4,5 Tahun Penjara

KARANGANYAR (KR) - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Kades Berjo Ngargoyoso Suyatno. Selain hukuman badan juga hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, mantan Dirut BUMDes Berjo, Eko Kamasono, divonis 4 tahun penjara serta denda dan subsider yang sama dalam kasus korupsi aliran dana pengembangan obyek wisata di Desa Berjo.

Keduanya juga diminta membayar uang pengganti Rp 525.655.975.135 subsider 1 tahun kurungan. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang kasus korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/4). Majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya, vonisnya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 7,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah, mengatakan JPU masih pikir-pikir terkait vonis Majelis Hakim tersebut. "Kami masih punya waktu satu pekan setelah putusan ini apakah akan menerima atau mengajukan banding," jelasnya.

Sementara terpidana Suyatno mengambil langkah mengajukan banding atas putusan tersebut. Sikap berbeda dilakukan Eko Kamasono yang memilih menerima putusan itu.

Warga Berjo, Sularno, mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus pengelolaan dana BUMDes Berjo. Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama bagi pengelola dana BUMDes. Agar jangan sampai penggunaan dana BUMDes disalahgunakan.

"Kedepan pengelolaan harus lebih baik. Jangan disalahgunakan dan lebih transparan," pintanya.

Sularno sebelumnya ikut diperiksa kejaksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana BUMDes Berjo. Keterangannya diperlukan selaku perwakilan warga atas kasus korupsi ini.

Diketahui warga Berjo melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes setempat ke Kejari Karanganyar. Hasil laporan ditindaklanjuti tim Kejari yang maraton memeriksa saksi-saksi. Kemudian menetapkan Suyatno dan Eko Kamasono sebagai tersangka. Akibat kerugiannya itu negara mengalami kerugian hingga Rp1,16 miliar.

Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Mereka diduga melakukan markup anggaran sejumlah

proyek pembangunan di kawasan wisata Telaga Madirda. Proyek itu di antaranya pembangunan lahan parkir, kolam renang, dan flying fox. Mereka juga menggunakan dana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kepentingan pribadi pada periode 2020. (Lim)-f



Kades Berjo Suyatno resmi ditahan Kejaksaan. KR-Abdul Alim